



Analisis Miskonsepsi Guru dalam Penerapan Profesionalisme dan Etika Pembelajaran

Ninda Amelia Rozana¹, Uswatun Khasanah², Aqilla Daffa Azzahra³, Nita Yuli Astuti⁴

^{1,2,3}Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Walisongo, Semarang, Indonesia

⁴UIN Walisongo, Semarang, Indonesia

Email: ¹nindaamel36@gmail.com, ²uswatunkhasanah2336@gmail.com, ³aqilladaffa224@gmail.com,

⁴nitayuli@walisongo.ac.id

Informasi Artikel

Submitted: 04-11-2025

Accepted: 26-12-2025

Published: 15-01-2026

Keywords:

Teacher Misconceptions

Professionalism

Learning Ethics

Abstract

This article analyzes teachers' misconceptions in interpreting professionalism and learning ethics and their impact on the quality of the learning process. This study evaluates how misunderstandings about professionalism are often reduced to mere administrative compliance and certification acquisition, as well as misconceptions about ethics that are narrowed down to mere politeness without considering moral responsibility, fairness, and objectivity in learning interactions. Through a literature review approach, this study examines various scientific literature to show how these misconceptions affect the effectiveness of knowledge transfer and the development of teachers' pedagogical competencies. The findings show that misunderstandings occur not only among students but also among teachers, even those who are certified, because certification is not yet fully capable of changing mindsets and pedagogical practices. This situation points to the importance of strategies to strengthen professionalism through improving academic standards, implementing training or Continuing Professional Development (CPD), active involvement in professional organizations, and the application of mentoring and coaching. Overall, this analysis confirms that strengthening teacher professionalism and ethics is an urgent need to realize meaningful and fair learning.

Abstrak

Artikel ini menganalisis miskonsepsi guru dalam memaknai profesionalisme dan etika pembelajaran serta dampaknya terhadap kualitas proses belajar. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana pemahaman keliru mengenai profesionalisme yang sering direduksi sebatas pemenuhan administrasi dan perolehan sertifikasi, serta miskonsepsi tentang etika yang dipersempit hanya pada aspek sopan santun tanpa mempertimbangkan tanggung jawab moral, keadilan, dan objektivitas dalam interaksi pembelajaran. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini menelaah berbagai literatur ilmiah untuk menunjukkan bagaimana miskonsepsi tersebut memengaruhi efektivitas transfer ilmu dan perkembangan kompetensi pedagogik guru. Temuan menunjukkan bahwa kesalahan pemahaman tidak hanya terjadi pada siswa, tetapi juga pada guru, bahkan yang telah tersertifikasi, karena sertifikasi belum sepenuhnya mampu mengubah mindset dan praktik pedagogis. Situasi ini mengarah pada pentingnya strategi penguatan profesionalisme melalui peningkatan standar akademik, pelaksanaan pelatihan atau Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB), keterlibatan aktif dalam organisasi profesi, serta penerapan mentoring dan coaching. Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa penguatan profesionalisme dan etika guru merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan adil.

Kata Kunci: Miskonsepsi Guru, Profesionalisme, Etika Pembelajaran.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang memiliki tujuan mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh yang mencakup berbagai aspek, seperti aspek kognitif, afektif serta psikomotorik. Pada konteks ini, seorang guru memegang peranan yang sangat penting sebagai pendukung serta mendorong para siswa dalam belajar [1]. Nurlatifah berpendapat profesionalisme guru tidak hanya diukur dari kemampuan akademik, tetapi juga dari keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi secara bijaksana dengan siswa. Guru yang menguasai materi sekaligus mampu menyampaikannya dengan jelas dan menarik akan lebih efektif dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa kompetensi profesional guru mencakup penguasaan substansi keilmuan, kreativitas dalam mengembangkan pembelajaran, refleksi berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi [2]. Dengan demikian, profesionalisme bukan hanya praktik di kelas, melainkan juga kompetensi keilmuan yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Menurut Dorlan, Bombom dan Romauli profesionalisme juga memiliki keterkaitan erat dengan etika. Penerapan kode etik profesi mendukung kualitas interaksi guru dan siswa, karena guru yang beretika akan lebih berhati-hati dalam bertindak, menjaga integritas, serta berlaku adil dan objektif, sehingga tercipta lingkungan belajar yang sehat dan kompetitif. Namun dalam praktiknya, masih sering muncul miskonsepsi, baik dalam pembelajaran maupun dalam penerapan profesionalisme dan etika. Miskonsepsi merupakan pemahaman keliru yang timbul akibat bimbingan atau pengajaran yang tidak tepat [3]. Kondisi ini berdampak negatif bagi siswa, karena menghambat pemahaman konsep baru dan menimbulkan kesulitan belajar. Bahkan, miskonsepsi bisa berbeda-beda pada setiap siswa dengan penyebab yang beragam [4]. Dengan demikian, profesionalisme guru yang beretika adalah wajib, tetapi tanpa pengajaran yang akurat, etika tersebut bisa sia-sia karena kegagalan transfer ilmu justru menimbulkan miskonsepsi serius yang merusak proses belajar siswa.

Untuk itu, guru dituntut mampu mengenali dan mengatasi miskonsepsi. Berbagai metode dapat digunakan, di antaranya: gambar, yang sederhana dan menyenangkan untuk mengekspresikan ide, Two-Tier Diagnostic Test, berupa soal pilihan ganda dengan alasan jawaban, wawancara klinis, untuk menggali konsepsi siswa secara mendalam, peta konsep, yang membantu mengorganisasi hubungan antar-konsep, serta Certainty of Response Index (CRI), yaitu metode yang menilai tingkat keyakinan siswa terhadap jawaban mereka [5]. Dengan memahami miskonsepsi dan cara mengidentifikasinya, guru dapat meningkatkan profesionalisme sekaligus menjaga penerapan etika dalam pembelajaran.

Salah satu problematika yang dihadapi dalam dunia pendidikan saat ini adalah miskonsepsi guru dalam memaknai profesionalisme dan etika pembelajaran. Tidak sedikit guru yang memahami arti profesionalisme itu sendiri. Masih terdapat guru yang menganggap mengajar hanya sebatas urusan administrasi, yang akhirnya mengabaikan pentingnya kompetensi pedagogik. Akibatnya, siswa mungkin tidak mencapai hasil belajar yang maksimal karena metode pengajaran kurang efektif dan tidak memenuhi kebutuhan belajar siswa [6]. Begitu pula masih terdapat guru yang salah menafsirkan arti etika. Etika sering dipahami hanya sebatas sopan santun saja, padahal etika pembelajaran seharusnya mencakup sikap yang lebih luas seperti menghargai perbedaan, bersikap adil dan objektif dalam menilai, serta menghindari bias dalam penilaian, seperti yang tertera dalam kode etik guru Indonesia. Miskonsepsi yang terjadi dalam memaknai profesionalisme dan etika pembelajaran ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya guru memahami nilai-nilai profesional dan etis secara komprehensif. Oleh karena itu, miskonsepsi harus segera ditangani agar proses pembelajaran menjadi lebih maksimal dan siswa menjadi termotivasi untuk belajar lebih baik lagi.

Literatur mengenai miskonsepsi dalam pendidikan, telah banyak di bahas dari berbagai perspektif, khususnya yang berkaitan dengan profesionalisme dan etika sebagai seorang guru. Secara umum terdapat tiga kecenderungan utama yang dapat diidentifikasi dari peneliti-peneliti sebelumnya. Pertama, penelitian yang mengenai pemahaman miskonsepsi dan profesionalisme guru mengalami peningkatan dengan menggunakan strategi lesson study [7]. Selain itu, guru juga mengalami peningkatan terhadap keterampilan di bidang pedagogis. Hal ini menunjukkan bahwa miskonsepsi bisa terjadi pada guru, sehingga membutuhkan sebuah pembinaan khusus agar pembelajaran berjalan secara efektif.

Kedua, terdapat kajian mengenai miskonsepsi dengan strategi komunikasi guru dalam proses pembelajaran. Miskonsepsi siswa terhadap membaca, menulis serta berhitung dapat diatasi dengan cara komunikasi menggunakan empat teknik, yakni asosiasi, integrasi, ganjaran dan penataan pesan [8]. Ketiga, kajian yang merujuk pada aturan profesi guru tentang adanya miskonsepsi mengenai konsep profesionalisme. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menimbulkan ketidakpastian, seperti

belum dapat membedakan antara peran guru dan dosen dalam menilai profesionalisme dilihat dari sertifikasi [9]. Hal ini menegaskan bahwa keterampilan komunikasi seorang guru menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi adanya miskonsepsi, sehingga guru tidak hanya dilihat dari segi penguasaan materi saja, tetapi juga pada interaksi guru dan siswa, serta profesionalisme seorang guru tidak dapat dilihat pada urusan administrasi, tetapi juga dilihat dari berbagai aspek dalam suatu proses pembelajaran.

Dengan demikian, literatur-literatur sebelumnya yang telah mengurai permasalahan miskonsepsi dalam pendidikan yang terjadi tidak hanya pada siswa saja, melainkan pada guru serta hubungannya dengan profesionalisme dan etika pembelajaran. Namun, kajian mengenai menganalisis miskonsepsi guru dalam penerapan profesionalisme dan etika pembelajaran masih relatif terbatas. Sebagian ulasan penelitian terdahulu cenderung membahas aspek tersebut secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh tentang keterkaitan antara miskonsepsi guru, profesionalisme, dan praktik etika dalam pembelajaran. Artikel ini dimaksudkan untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan menyajikan analisis secara komprehensif mengenai miskonsepsi guru dalam pemahaman profesionalisme dan penerapan etika pembelajaran, sehingga dapat memperkaya kajian keilmuan dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis miskonsepsi guru dalam memaknai profesionalisme dan etika pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pengajar untuk menyadari pentingnya memperkuat profesionalisme sekaligus menjunjung tinggi etika, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih bermakna dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (literature review) dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis dalam menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji miskonsepsi guru, profesionalisme guru, serta etika dalam pembelajaran.

Tahap awal pencarian literatur menemukan sekitar 35 artikel yang relevan. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu: (1) artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses penelaahan sejawat (peer-reviewed), (2) membahas miskonsepsi guru, profesionalisme guru, atau etika pembelajaran, dan (3) diterbitkan dalam rentang 5–10 tahun terakhir. Artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian atau bersifat duplikat dikeluarkan dari analisis, sehingga diperoleh 26 artikel yang digunakan sebagai sumber rujukan. Sebanyak 8 artikel dipilih untuk dianalisis secara lebih mendalam. Pemilihan artikel tersebut didasarkan pada tingkat relevansi yang tinggi terhadap fokus kajian, khususnya yang secara eksplisit membahas miskonsepsi guru serta keterkaitannya dengan profesionalisme dan etika dalam pembelajaran. Sementara itu, artikel lainnya digunakan sebagai pendukung teoretis dan kontekstual dalam memperkuat pembahasan.

Artikel terpilih kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-naratif, yaitu mendeskripsikan, membandingkan, dan mensintesis temuan-temuan penelitian sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana miskonsepsi guru memengaruhi pemahaman profesionalisme dan penerapan etika dalam pembelajaran. Langkah-langkah ini mengadopsi prinsip seleksi literatur berdasarkan alur PRISMA secara sederhana, guna meningkatkan transparansi dan keandalan kajian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profesionalisme Guru

Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa dalam praktik pendidikan, profesionalisme guru kerap dipahami sebagai pemenuhan persyaratan formal, seperti kepemilikan ijazah, sertifikasi pendidik dan kelengkapan dokumen pembelajaran. Pemahaman semacam ini cenderung mengabaikan esensi profesionalisme yang sesungguhnya, yaitu kualitas keterlibatan guru dalam proses pembelajaran. Profesionalisme seharusnya tercermin dari bagaimana guru membangun relasi pedagogis dengan peserta didik, merancang pengalaman belajar yang bermakna, serta menunjukkan tanggung jawab etis dalam mendukung perkembangan karakter dan kemampuan berpikir peserta didik [10].

Dalam perkembangannya, kebijakan pendidikan dan tuntutan kelembagaan justru mendorong terjadinya pergeseran orientasi profesionalisme guru. Perhatian terhadap peningkatan kualitas pembelajaran sering kali tergeser oleh kewajiban administratif yang semakin kompleks. Beban kerja administratif yang tinggi

menyebabkan guru memiliki keterbatasan waktu dan ruang untuk melakukan refleksi, berinovasi, serta mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkelanjutan. Akibatnya, profesionalisme lebih sering dimaknai sebagai kepatuhan terhadap prosedur, bukan sebagai praktik pendidikan yang bermakna.

Lebih lanjut, profesionalisme guru pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi ajar, tetapi juga oleh sikap, integritas, rasa tanggung jawab, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan. Tantangan profesionalisme semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pembelajaran di era digital. Ketika profesionalisme direduksi menjadi sekadar status formal atau legitimasi administratif, dimensi moral dan pedagogis profesi guru cenderung terpinggirkan, sehingga dampaknya terhadap kualitas pembelajaran menjadi minimal [11].

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat adanya kesenjangan antara konsep ideal profesionalisme guru dan realitas penerapannya di lapangan. Kesenjangan ini memunculkan berbagai miskonsepsi dalam memaknai profesionalisme, di mana profesionalisme dipersepsikan sebagai tujuan akhir yang bersifat administratif, bukan sebagai proses berkelanjutan yang menuntut refleksi kritis, pengembangan kompetensi, dan komitmen etis dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Oleh karena itu, kajian mengenai profesionalisme guru perlu diarahkan pada analisis pola-pola miskonsepsi tersebut serta implikasinya terhadap praktik pembelajaran dan etika profesi guru.

3.2 Miskonsepsi Guru dalam Penerapan Profesionalisme dan Etika Pembelajaran

Profesionalisme guru di Indonesia telah diamanatkan secara jelas oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Khususnya pada Pasal 8 dan Pasal 10, regulasi ini menegaskan bahwa setiap pendidik wajib memiliki empat kompetensi dasar yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ini merupakan prasyarat mutlak yang diharapkan dapat menopang kinerja profesional guru di garda terdepan pendidikan. Namun, realitas di lapangan kerap menghadirkan tantangan yang kompleks. Pemenuhan kompetensi ini tidak selalu berjalan mulus. Salah satu akar masalahnya terletak pada rendahnya minat generasi muda berprestasi untuk memilih profesi guru. Mengapa demikian? Faktor kesejahteraan dan upah yang kurang menarik menjadi alasan kuat. Fenomena ini bahkan mendorong banyak lulusan dari bidang non-pendidikan untuk mengejar sertifikasi guru, bukan karena panggilan jiwa, melainkan sebagai jalan keluar dari kesulitan mencari karier lain [12]. Ini jelas mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tak bisa hanya bertumpu pada formalitas sertifikasi, melainkan harus dimulai dari fondasi yang lebih kuat dengan pembangunan kompetensi dasar dan etika profesi sejak awal proses pembentukan calon guru.

Sertifikasi guru sejatinya dirancang sebagai bentuk pengakuan atas profesionalitas seorang pendidik, bukan semata-mata sebagai jaminan peningkatan kesejahteraan. Namun, ironisnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa guru yang telah bersertifikat pun sering kali tidak memperlihatkan peningkatan signifikan dalam kualitas pedagogis mereka. Sertifikasi belum sepenuhnya berhasil mengubah metode mengajar, apalagi membentuk mindset profesional yang adaptif. Bahkan, partisipasi guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) cenderung rendah, sering kali karena anggapan bahwa tuntutan kinerja baru telah usai pasca-sertifikasi [13]. Di sinilah letak miskonsepsi yang krusial, di mana profesionalisme sering kali hanya dipahami secara administratif sebatas memperoleh legitimasi formal tanpa dibarengi perubahan sikap reflektif, etis, dan intelektual sebagai seorang pendidik sejati.

Permasalahan mendalam lainnya yang turut melemahkan profesionalisme guru adalah miskonsepsi mengenai etika pembelajaran. Seringkali, etika ini hanya diartikan sebatas perilaku tampak, seperti sopan santun, kerapian berpakaian, atau kepatuhan pada aturan administratif semata. Padahal, cakupan etika pembelajaran jauh melampaui itu. Ia meliputi kemampuan mengambil keputusan moral yang tepat, menegakkan keadilan di ruang kelas, membangun hubungan profesional yang tulus dengan siswa, serta mengemban tanggung jawab moral yang luhur sebagai pendidik [14]. Ketika etika direduksi hanya pada aspek penampilan, guru berisiko kehilangan pemahaman akan kedalaman esensi etika sebagai kapasitas reflektif untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermartabat dan humanis. Para ahli pendidikan pun sepakat, etika pembelajaran merupakan pilar penting profesionalisme. Ia mengintegrasikan kompetensi pedagogis dengan integritas dan moralitas guru. Tanpa pemahaman etika yang memadai, seorang guru akan kesulitan menghadapi dilema moral yang muncul dalam proses belajar-mengajar, dan pada akhirnya, pendidikan pun kehilangan karakter humanisnya [15]. Oleh karena itu, penguatan etika bukan hanya vital untuk menjalin hubungan harmonis antara guru dan siswa, melainkan juga untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai secara holistik melalui pendekatan yang adil, empatik, dan berintegritas.

Peran guru sebagai teladan moral dan sosial tak dapat dimungkiri sangat menentukan kualitas lingkungan belajar. Etika kepribadian dan kode etik guru berfungsi membentuk atmosfer kelas yang kondusif, yang berlandaskan pada nilai-nilai inti seperti kedisiplinan, kejujuran, empati, dan rasa hormat. Guru yang

mampu menjadi model perilaku positif akan memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan karakter siswa. Sementara itu, kode etik bertindak sebagai kompas, memandu objektivitas dan profesionalitas dalam pengajaran, demi terciptanya lingkungan belajar yang aman dan berkeadilan bagi semua [16]. Ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kompetensi akademik, tetapi juga pada integritas dan konsistensi etika seorang guru. Selain itu, miskonsepsi profesionalisme juga merefleksikan lemahnya pemahaman guru terhadap regulasi. Meskipun UU 14/2005 telah mengatur kewajiban profesional dan etis secara gamblang, sejumlah penelitian mengungkap bahwa banyak guru hanya memahaminya dari sudut pandang administratif, bukan sebagai panduan moral profesi [17]. Artinya, persoalan tidak hanya terletak pada praktik di lapangan, melainkan juga pada pemahaman normatif yang sejak awal kurang mendalam.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa miskonsepsi guru terhadap profesionalisme dan etika pembelajaran bukanlah sekadar masalah individual, melainkan problem sistemik yang melibatkan beragam aspek. Mulai dari kualitas rekrutmen calon guru, kedalaman pemahaman terhadap regulasi, budaya sekolah yang mendukung, hingga minimnya internalisasi kode etik profesi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas guru tidak bisa berhenti hanya pada sertifikasi atau kenaikan tunjangan semata. Ia harus mencakup pelatihan etika profesional yang komprehensif, pendampingan berkelanjutan, serta penguatan pemahaman akan tujuan pendidikan yang lebih manusiawi dan bermartabat.

3.3 Strategi untuk Mengatasi Miskonsepsi Guru dalam Upaya Penerapan Profesionalisme dan Etika Pembelajaran

Miskonsepsi guru terhadap penerapan profesionalisme dan etika pembelajaran masih saja sering terjadi, sehingga memerlukan berbagai strategi yang tepat. Dengan menerapkan strategi yang tepat, miskonsepsi tersebut dapat diatasi dengan baik dan dapat meningkatkan profesionalitas guru. Berikut ini merupakan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya miskonsepsi pada guru mengenai penerapan profesionalisme dan etika pembelajaran:

3.3.1 Meningkatkan Standar Akademik di Jenjang Pendidikan Formal

Pemahaman yang tepat mengenai profesionalisme dan etika guru memegang peran sentral dalam upaya peningkatan standar akademik di pendidikan formal. Moralitas guru, yang mencakup kejujuran, integritas, dan tanggung jawab, merupakan fondasi yang menuntun perilaku profesional di lingkungan kelas. Syam dan Santaria (2020) menegaskan bahwa moralitas tidak dapat dipisahkan dari profesionalisme, keduanya berkontribusi langsung pada mutu proses pembelajaran. Ketika moralitas dianggap sebagai pelengkap teknis mengajar, alih-alih elemen inti profesi, terjadi miskonsepsi mengenai makna guru profesional. Seorang guru mungkin merasa cukup dengan penguasaan materi, padahal keteladanan moral justru yang menentukan kualitas interaksi dengan siswa dan efektivitas pembelajaran. Dengan memahami hubungan erat antara moralitas dan peran edukatif, seorang guru mampu menyeimbangkan penguasaan konten dengan pembentukan karakter peserta didik.

Di sisi lain, peningkatan profesionalisme guru membutuhkan mekanisme pembinaan yang tepat. Fadli, Badruzzaman dan Purnama (2022) menunjukkan bahwa supervisi akademik bukan sekadar alat kontrol, melainkan proses pendampingan yang membantu guru berkembang secara pedagogis maupun profesional. Supervisi yang dilakukan secara dialogis mampu meluruskan miskonsepsi guru tentang standar akademik, metode mengajar, dan etika kerja. Apabila guru tidak pernah mendapat umpan balik profesional, terdapat potensi pola mengajar yang tidak sesuai standar atau bahkan bertentangan dengan etika profesi terus berlangsung. Dalam konteks peningkatan mutu akademik, supervisi menjadi jembatan penting antara kebijakan pendidikan, standar akademik, dan praktik nyata di kelas.

Selain moralitas dan supervisi, etika profesi dalam konteks teknologi informasi juga menjadi hal mendasar. Sarwiti (2025) menekankan bahwa era digital menghadirkan tantangan etis baru yang dapat mengaburkan batas profesionalisme guru jika tidak dipahami dengan benar. Miskonsepsi sering muncul ketika guru menganggap teknologi sebagai solusi instan, bukan alat yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Sebagai contoh, penggunaan platform digital tanpa memperhatikan privasi siswa, plagiarisme saat membuat materi, atau penilaian otomatis yang tidak akuntabel dapat menurunkan standar akademik. Oleh karena itu, pemahaman etika digital perlu disejajarkan dengan kompetensi pedagogik agar guru tetap profesional dalam ekosistem pembelajaran modern.

Pada akhirnya, gambaran mengenai profil pendidik profesional sebagaimana dipaparkan oleh Choliq (2025) menegaskan bahwa kompetensi guru meliputi ranah pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang keseluruhannya harus dilandasi etika keguruan. Miskonsepsi sering terjadi ketika guru hanya menekankan aspek teknis, seperti metode mengajar atau penggunaan teknologi, tanpa memahami bahwa etika adalah

inti dari seluruh kompetensi tersebut. Seorang guru profesional adalah sosok yang menguasai materi, mampu mengajar dengan baik, memiliki karakter kuat, dan mempraktikkan nilai-nilai moral secara konsisten. Ketika seorang guru memahami profil profesional secara menyeluruh, standar akademik dapat diterapkan bukan hanya sebagai tuntutan administratif, tetapi sebagai praktik bermartabat dalam mencerdaskan peserta didik.

3.3.2 Mengadakan Pelatihan dan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB)

Melaksanakan kegiatan PKB ini merupakan salah satu strategi yang sering dilakukan untuk mengatasi miskonsepsi yang terjadi pada guru. Kegiatan ini seperti pelatihan, workshop, seminar atau pendampingan dapat membantu guru dalam memahami regulasi pendidikan yang baru, meningkatkan kompetensi pedagogik dan etika profesi bahkan memperluas wawasan pengetahuan. Guru yang mengikuti kegiatan PKB secara rutin akan mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai konsep profesionalisme serta dapat meninjau ulang praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Selain itu, peran aktif guru dalam kegiatan ini perlu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan penyesuaian tersebut kompetensi yang sedang dikembangkan oleh guru dapat menjadi relevan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya [22]. Kegiatan PKB ini strategi yang sangat penting untuk mengatasi miskonsepsi guru, karena dapat membantu memahami regulasi baru, meningkatkan profesionalisme serta menyesuaikan pengembangan diri dengan tuntutan tugas.

Untuk mengetahui bahwa kegiatan PKB ini efektif, maka perlu diadakan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi pada kegiatan PKB tersebut, dapat diketahui manakah yang benar-benar dapat memahami serta menarapkan materi yang telah diajarkan, sekaligus dapat menentukan bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang digunakan sebagai dukungan tambahan. Upaya tersebut memastikan kemampuan dan pengetahuan yang dicapai dapat diterapkan secara maksimal. Apabila kegiatan PKB ini berjalan dengan baik, maka dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme bagi para guru serta dapat membantu guru agar mereka memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi segala macam tantangan yang dihadapi di dalam pendidikan yang selalu berubah. [23]. Evaluasi terhadap pelaksanaan PKB sangat diperlukan untuk memastikan ke efektifitasnya agar kemampuan dan pengetahuan guru yang diperoleh dari kegiatan tersebut dapat diterapkan dengan maksimal, serta mereka memiliki persiapan untuk menghadapi berbagai macam tuntutan pendidikan.

3.3.3 Mengikuti Kompetisi dan Organisasi Profesi

Kompetisi guru ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menunjukkan apresiasi kepada guru yang sudah melakukan berbagai kinerja dengan luar biasa, baik dalam inovasi pengajaran, kontribusi untuk sekolah maupun pada hasil belajar siswa. Namun, tujuan yang paling utama dalam kegiatan ini adalah untuk mendorong motivasi dan profesionalisme guru melalui pengakuan atas pengabdian dan kerja kerasnya. Kompetisi ini memiliki dorongan agar guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan metode pembelajaran, serta guru diberi kesempatan untuk berinteraksi dan bertukar pengalaman dengan rekan sesama guru dari berbagai sekolah [24]. Kegiatan kompetisi terhadap guru berfungsi sebagai bentuk penghargaan yang mendorong motivasi, kreativitas serta profesionalisme guru melalui pengakuan dedikasi dan kinerja guru.

Selain melalui kegiatan kompetisi, upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru juga dapat dilakukan melalui keberadaan organisasi guru. Organisasi profesi guru merupakan organisasi yang menaungi para guru dengan keahlian tertentu. PGRI adalah salah satu dari organisasi profesi guru dan organisasi ini memiliki posisi yang sangat penting bagi guru di Indonesia. Organisasi PGRI berfungsi sebagai penggerak dalam upaya peningkatan kompetensi guru dan lembaga kependidikan, salah satunya mendorong munculnya inovasi yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, organisasi PGRI juga memiliki fungsi sebagai tempat bagi guru untuk menyampaikan apresiasi, berbagi informasi antar sesama serta mengupayakan hak-hak guru yang belum terpenuhi. Di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 menjelaskan bahwa organisasi PGRI berfungsi sebagai menguatkan profesionalisme guru dan meminimalisir perbedaan kualitas pendidikan antar daerah. Dengan hal-hal tersebut, maka PGRI memiliki tanggung jawab yang begitu besar untuk membimbing guru agar memenuhi standar profesional, mempertahankan hak mereka dan mengawasi anggotanya agar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab [25]. Organisasi guru, salah satunya PGRI memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas guru, memperjuangkan hak-hak guru serta mengurangi ketimpangan profesionalisme pendidik antar daerah.

Organisasi guru bukan hanya sebagai tempat pengembangan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga berperan penting dalam menumbuhkan kerja sama yang positif di antara para pendidik. Melalui berbagai forum keprofesional yang dilaksanakan secara rutin, guru dapat saling bertukar pengalaman, mengutarakan

ide dan mempelajari strategi pembelajaran dari rekan sesama guru. Kegiatan ini juga dapat menumbuhkan hubungan, rasa kebersamaan serta kesadaran bersama akan pentingnya profesionalisme yang terus berkembang dengan pesat. Saat guru merasa saling mendukung satu sama lain dan terlibat dalam komunitas yang aktif, mereka memiliki motivasi yang sangat besar untuk meningkatkan kompetensi dirinya, naik dalam penguasaan materi maupun pembaruan pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan nyata. Lingkungan ini dapat membantu terciptanya kegiatan pembelajaran yang lebih bekerja sama dan lebih bermakna. Selain itu, guru menjadi lebih terbuka untuk mengevaluasi diri, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, organisasi profesi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan [26]. Organisasi profesi berkontribusi besar dalam menciptakan suatu budaya kolaboratif yang sangat mendukung perkembangan profesional guru, sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna serta relevan dengan perkembangan zaman.

3.3.4 Mentoring dan Coaching

Mentoring dan coaching merupakan dua pendekatan penting dalam membantu guru berkembang secara profesional. Dalam mentoring, guru yang lebih berpengalaman mendampingi guru baru untuk memberikan arahan, dukungan emosional, juga masukan agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan memahami tugas mengajar. Sementara coaching, lebih sistematis dan berfokus untuk meningkatkan kinerja melalui refleksi, penetapan tujuan, pengamatan praktik mengajar, dan umpan balik yang terarah agar guru menemukan solusi dan bisa meningkatkan keterampilan dan kemampuannya secara mandiri. Agar pendekatan ini lebih efektif, maka dibutuhkan pembimbing dan pelatih yang kompeten dan memadai, serta program yang dirancang secara jelas dan mendapat dukungan dari sekolah. Dengan mendapat pembimbingan yang baik, diharapkan guru dapat mengembangkan kemampuannya, memperbaiki praktik dalam mengajar, serta memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan bermakna bagi siswa [23].

4. KESIMPULAN

Profesionalisme seorang pendidik adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak hanya memerlukan keahlian teknis yang diperoleh dari pendidikan, tetapi juga memerlukan komitmen terhadap etika, tanggung jawab, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Namun, di Indonesia, terdapat banyak kesalahpahaman mengenai praktik profesionalisme; di satu sisi, hal ini sering kali dipandang sebagai sekadar aturan administratif, khususnya setelah sertifikasi, tanpa adanya perbaikan nyata dalam kualitas pengajaran. Di sisi lain, etika dalam pembelajaran sering diartikan hanya sebagai perilaku yang terlihat, mengabaikan hakekat etika yang sebenarnya sebagai kemampuan untuk merenung dan memperjuangkan keadilan serta tanggung jawab moral yang dalam. Untuk mengatasi kesalahpahaman yang meluas ini dan meningkatkan kualitas pendidik secara menyeluruh, diperlukan pendekatan yang terpadu. Pendekatan ini mencakup peningkatan standar akademik dengan menjadikan nilai-nilai moral sebagai dasar utama profesi, didukung oleh supervisi yang membantu dan pemahaman tentang etika digital. Selain itu, pelatihan berkelanjutan yang rutin dan dinilai, serta keterlibatan aktif dalam kompetisi dan organisasi profesi (seperti PGRI), merupakan faktor penting yang dapat mendorong motivasi, inovasi, dan kerja sama di antara para pendidik. Terakhir, penerapan bimbingan dan pelatihan memberikan dukungan individual yang terfokus, memungkinkan pendidik berpengalaman untuk membimbing mereka yang kurang berpengalaman, serta memfasilitasi pemikiran mandiri untuk perbaikan cara mengajar. Dengan demikian, fokus peningkatan kualitas guru seharusnya pada penghayatan etika, komitmen moral, dan pengembangan diri yang berkelanjutan, melebihi sekadar memenuhi tuntutan administratif.

REFERENCES

- [1] H. Amalah and H. P. Sari, "Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Migas Bumi Melayu Riau," no. 16, 2025.
- [2] J. Salsabillah, M. D. Andhini, S. Aisya, and A. Irma, "Etika Profesi Sebagai Pilar Penguatan Kompetensi Profesional Guru," *JPIM J. Penelit. Ilm. Multidisipliner*, vol. 01, no. 05, pp. 1067–1072, 2025.
- [3] M. Sihalo, S. S. Hadis, A. K. Kilo, and A. La Kilo, "Diagnosa Miskonsepsi Siswa SMA Negeri 1 Telaga Gorontalo pada Materi Termokimia," *Jambura J. Educ. Chem.*, vol. 3, no. 1, pp. 7–13, 2021, doi: 10.34312/jjec.v3i1.7133.
- [4] R. Utami, "Analisis Miskonsepsi Siswa Dan Cara Mengatasinya Pada Materi Bentuk Aljabar Kelas Vii-C Smp Negeri 13 Malang," *JPM J. Pendidik. Mat.*, vol. 3, no. 1, p. 37, 2019, doi: 10.33474/jpm.v3i1.2606.

- [5] N. Mukhlisa, “Miskonsepsi Pada Peserta Didik,” *SPEED J. J. Spec. Educ.*, vol. 4, no. 2, pp. 66–76, 2021, doi: 10.31537/speed.v4i2.403.
- [6] E. Supriyadi, “Kompetensi Pedagogik Guru dan Dampaknya terhadap Proses Belajar Siswa,” *J. Pendidik. dan Pembelajaran*, vol. 10, no. 2, pp. 23–34, 2020.
- [7] H. Basri, S. I. Hasanah, and F. Nuritasari, “Workshop Lesson Study dan Pemahaman terhadap Miskonsepsi sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru,” *Bima Abdi J. Pengabd. Masy.*, vol. 5, no. 1, pp. 198–209, 2025, doi: 10.53299/bajpm.v5i1.1335.
- [8] B. A. Faozan, M. Jauhari, and K. Wazis, “Komunikasi Persuasif Sebagai Teknik Mengajar Guru Dalam Mengatasi Miskonsepsi Siswa RA Al-Badri Jember,” *Cetta J. Ilmu Pendidik.*, vol. 7, no. 2, pp. 20–33, 2024, doi: 10.37329/cetta.v7i2.3192.
- [9] M. Zakiyah, “Miskonsepsi Guru dan Dosen Profesional,” *J. Pendidik.*, no. 21-Nov-2018, 2018, [Online]. Available: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43103>
- [10] N. Hamidah and M. Hasanah, “Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Membentuk Karakter Peserta Didik,” *TAMADDUN J. Ilmu Sos. Seni, dan Hum.*, vol. 3, no. 2, pp. 69–77, 2025, doi: 10.70115/tamaddun.v3i2.288.
- [11] S. D. Masitoh and D. Purbowati, “Enhancing Teacher Professionalism in Indonesia: Challenges and Strategies for Digital Technology Utilization in the Society 5.0 Era,” *HEUTAGOGIA J. Islam. Educ.*, vol. 4, no. 2, pp. 219–236, 2024, doi: 10.14421/hjie.2024.42-06.
- [12] H. Risdiyand and Y. T. Herlambang, “Pengembangan Profesionalisme Guru dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan di Indonesia,” *EDUKATIF J. ILMU Pendidik.*, vol. 3, no. 3, pp. 817–822, 2021.
- [13] I. W. Muliana, I. K. Sukendra, and I. W. Sumandya, “Pkm. sdn apuan bangli dalam pengembangan kemahiran mengajar guru matematika di sekolah dasar untuk peningkatan profesional guru,” *J. PKM. WidyaMahadi*, vol. 3, no. Juni, pp. 10–20, 2023, doi: 10.59672/widyamahadi.v3i2.2976.
- [14] F. Simanjuntak and D. Naibaho, “Pengaruh Kode Etik Guru Terhadap Proses Pembelajaran,” *Tri Tunggal J. Pendidik. Kristen dan Katolik*, 2025.
- [15] A. N. Arfa, T. K. Saragih, and N. Hidayat, “Etika dalam Pengembangan Profesional Guru: Tantangan dan Solusi,” *JiIP - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 7, no. 12, pp. 14310–14318, 2024, doi: 10.54371/jiip.v7i12.6438.
- [16] S. Neltiana and R. Putri, “PERAN ETIKA KEPERIBADIAN DAN KODE ETIK GURU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN,” *Guruku J. Pendidik. Profesi Guru*, vol. 4, no. 1, pp. 11–19, 2025, [Online]. Available: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- [17] I. Yasin, “Guru Profesional, Mutu Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran,” *Ainara J. (Jurnal Penelit. dan PKM Bid. Ilmu Pendidikan)*, vol. vol 3, no., no. 27467767, pp. 61–66, 2022.
- [18] A. A. Syam and R. Santaria, “Moralitas dan Profesionalisme Guru sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan,” *J. Stud. Guru dan Pembelajaran*, vol. 3, no. 2, pp. 296–302, 2020, doi: 10.30605/jspp.3.2.2020.297.
- [19] Fadli, Badruzzaman, and H. Purnama, “Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Supervisi Akademik Pada SMP Negeri 1 Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya,” ... *J. Adminitrasi Dan ...*, no. 1, pp. 161–175, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/consilium>
- [20] Sarwiti, R. K. Sari, A. Sumarni, E. Nurlaely, and S. Kholifah, “Pengaruh Etika Profesi Terhadap Pencapaian Standar Kualitas Guru di Era Teknologi Informasi,” *J. Anak Bangsa*, 2025.
- [21] M. Choliq, Z. Zilmi, N. Q. Aizaroh, and D. Ainiyya, “Profil Profesional Pendidik: Kajian Terhadap Kompetensi dan Etika Keguruan,” *PIJAR J. Pendidik. dan Pengajaran*, vol. 3, no. 3, pp. 282–295, 2025, doi: 10.58540/pijar.v3i3.977.
- [22] A. N. Pratiwi, C. D. S. Indrawati, and Winarno, “Implementasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan pada guru di SMK Wikarya Karanganyar,” *J. Inf. dan Komun. Adm. Perkantoran*, vol. 8, no. 4, pp. 371–380, 2024, [Online]. Available: https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/105074/%0Ahttps://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/105074/NjQ4NzAw/IMPLEMENTASI-PROGRAM-PENGEMBANGAN-KEPROFESIAN-BERKELANJUTAN-PADA-GURU-DI-SMK-WIKARYA-KARANGANYAR-DAPUS_K7519001.pdf

- [23] A. Miramadhani, A. Putri, and F. Faelasup, “Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru,” *J. Ilmu Pendidik. Sos.*, vol. 2, no. 3, pp. 253–266, 2024, doi: 10.71382/sinova.v2i3.155.
- [24] A. Dawam and A. Z. Makin, “Dampak Event Kompetisi Guru Berprestasi Terhadap Kinerja Profesional Guru Madrasah Ibtidiyah,” *Elem. J. Pendidik. Dasar*, vol. 4, no. 2, pp. 196–212, 2024, doi: 10.15408/elementar.v4i2.41297.
- [25] H. Haq Aidi, Z. Abidin, and H. Asy, “Peran Organisasi PGRI Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru,” *Intelegensia J. Pendidik. Islam*, vol. 11, no. 2, pp. 94–103, 2023.
- [26] H. Malim, “Peran Strategis dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Islam,” vol. 1, pp. 110–134, 2025.